

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden No.7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab.

Akuntabilitas di Indonesia ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja yaitu kinerja pegawai negeri sipil atau PNS sedang mendapat sorotan karena tingginya biaya negara tidak digunakan dengan baik. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ingin memangkas jumlah PNS di lingkungan Gedung MPR DPR karena tidak efektif. (Marzuki Alie 2012).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga

publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan.

Hal ini didasarkan pada argument, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebuah pelaksanaan pemerintahan yang bersih menuntut seluruh pemerintah bekerja secara professional dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada publik yang membuat ketidakpuasan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintah memicu timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Tuntut yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara yang di amanatkan kepada mereka.

Kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri karena semakin banyaknya instansi pemerintah yang terlihat tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih baik. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengintegrasikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik, dipihak penyelenggara, akuntabel mencerminkan komitmen pemerintah dalam meayani publik.

Menguatnya kasus kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk mencapai sasaran dan tujuan sehingga dapat menciptakan *good governance*. instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif.

Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam Menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi

perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan, peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitas. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut mardiasmo (2006) anggaran merupakan dokumen antara pemerintah dan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang. Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran *goal setting theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas secretariat DPRD Kota Kupang dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berklaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, sekretariat DPRD Kota Kupang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internak organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu, kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*).

Nugroho (2016) menyatakan bahwa Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.

Menurut Bastian (2006) akuntantansi sektor publik adalah mekanisme Teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial pada proyek-proyek Kerjasama sektor publik dan swasta.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angreini (2014) yaitu: kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2017) yaitu: kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja (survey pada DPRD Kota Bandung) hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. dari hasil sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja secara lebih mendalam khususnya di Kota Kupang.

Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Hwewin Kurniawan (2020) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan wilayah Jakarta selatan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian internal dan system pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan kejelasan sasaran anggaran pengendalian internal dan system pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Winda (2022) meneliti tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, masih ada beberapa peneliti memiliki hasil yang berbeda, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian di Kantor Sekretaris DPRD Kota Kupang, judul penelitian ini akan meneliti digunakan untuk mencari atau mengetahui kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja, dan juga hampir semua penelitian terdahulu menguji kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hanya saja hasil dari setiap penelitian masih ada yang belum memiliki hasil yang konsisten dari penelitian lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang”**.

1.2 Masalah Penelitian

Dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan penelitiannya adalah:

- a. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kota Kupang?
- b. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan yang di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kota Kupang

- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kota Kupang.

1.4.2 Kemanfaatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan penambahan pengembangan wawasan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja dan juga bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi serta pengetahuan tentang sektor publik.

- b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.

c. Bagi pemerintah Kota Kupang

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah pusat atau daerah agar dapat memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik untuk meningkatkan akntabilitas kinerja instansi pemerintah.